

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Laju Inflasi Jawa Barat pada triwulan-II 2021 masih tercatat lebih rendah dibanding rentang sasarannya. Pada periode pelaporan tercatat mengalami inflasi sebesar 1,46% (yoy) lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya (1,43%-yoy) maupun inflasi wilayah Jawa (1,20%-yoy) namun masih lebih rendah dibanding inflasi pada periode yang sama tahun lalu (2,76%-yoy). Secara spasial wilayah Jawa, laju inflasi Jawa Barat tercatat merupakan tertinggi kedua setelah inflasi Provinsi D.I. Yogyakarta (1,50%-yoy) pada periode yang sama. Secara umum, seluruh kelompok inflasi Jawa Barat pada triwulan-II 2021 lebih rendah dibanding triwulan yang sama periode sebelumnya dengan rata-rata perlambatan sebesar 46,53%. Rendahnya inflasi Jawa Barat triwulan-II 2021 masih disebabkan oleh belum pulihnya permintaan masyarakat akan barang dan jasa serta masih terbatasnya sisi produksi dikarenakan oleh berlanjutnya penerapan PPKM seiring gelombang kedua pandemi COVID-19. Dari 11 kelompok inflasi, hanya kelompok transportasi dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran yang mengalami peningkatan. Tercatat masing-masing kelompok tersebut memberikan andil inflasi sebesar 0,17% (yoy) dan 0,40% (yoy) lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu yang masing-masing tercatat 0,13% (yoy) dan 0,37% (yoy). Hal ini disebabkan oleh mobilitas masyarakat yang terpantau masih lebih baik dibanding tahun lalu (disebabkan penerapan PSBB) dan peningkatan permintaan makanan secara online seiring penerapan PPKM mikro maupun PPKM darurat. Berdasarkan kota pembentuk inflasi di Jawa Barat, seluruh kota mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi berada di Kota Bogor yang sebesar 1,81% (yoy). Tingginya inflasi di Kota Bogor didorong oleh kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dengan rata-rata peningkatan sebesar 302,7% (yoy). Meskipun terdapat penerapan PPKM mikro pada triwulan-II 2021 dan penerapan PPKM darurat di akhir periode laporan, aktivitas masyarakat Kota Bogor mengalami perbaikan khususnya sektor pariwisata. Sementara itu, Kota Tasikmalaya menjadi kota dengan level inflasi terendah yaitu sebesar 0,11% (yoy). Cukup rendahnya inflasi Kota Tasikmalaya disebabkan oleh perlambatan kelompok transportasi, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Sama seperti halnya Provinsi Jawa Barat, penerapan PPKM mikro maupun PPKM darurat berdampak terhadap aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Sebagai upaya pengendalian inflasi di daerah, TPID Provinsi Jawa Barat memiliki program kerja strategis berdasarkan roadmap pengendalian inflasi di daerah. Adapun permasalahan yang dihadapi terkait kenaikan harga yang terjadi selama triwulan-II 2021 yaitu: 1. Pembatasan aktivitas sosial-ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang merambah ke penurunan permintaan masyarakat akan barang dan jasa; 2. Faktor anomali cuaca; 3. Terjadi lonjakan kasus positif covid-19 varian delta pasca ramadhan dan lebaran yang cukup tinggi 4. Adanya kenaikan kebutuhan BOR dan oksigen yang semakin langka

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi Jawa Barat dengan dibentuknya TPID dan Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat menjalankan tugas dan fungsinya dalam upaya-upaya menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi diantaranya sebagai berikut: 1. Penambahan BOR di setiap rumah sakit, menghimbau rumah singgah dan hotel untuk menjadi tempat isoman 2. Intensifikasi koordinasi dengan pihak terkait perihal pengadaan oksigen dan

perhitungan kebutuhan pasien positif Covid-19 3. Kerjasama dengan Palembang dan Kalimantan untuk pengadaan dan ketersediaan oksigen di Jawa Barat. 4. Mengembangkan aplikasi POSKIBAR untuk memantau ketersediaan oksigen di Rumah Sakit dan sinkronisasi ketersediaan oksigen di distributor. Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit dapat mengajukan oksigen melalui POSKIBAR 5. Pengembangan aplikasi PIKOBAR dengan penambahan fitur OMAT (Oksigen Untuk Masyarakat) dimana masyarakat dapat mengajukan permohonan kebutuhan oksigen secara langsung pada aplikasi PIKOBAR. Layanan OMAT (layanan peminjaman tabung oksigen) pendistribusiannya bekerjasama dengan Jabar Quick Response, JNE, Jasa Sarana serta Komunitas amal seperti Baznas, gerakan Indonesia Kita (GITA), usaha Bersama Jabar (UBJ) dan rumah amal Salman ITB 6. Pengadaan liquid oksigen dan tabung oksigen serta menginisiasi membuat stasiun OMAT yaitu stasiun pengisian oksigen untuk masyarakat di dua wilayah untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat terutama pasien covid-19, terdapat di Kota Bandung dan Kabupaten Bogor. 7. Pemerintah membuka layanan isolasi terpadu untuk pasien covid di BPSDM, kerjasama dengan TNI di SECAPA AD dan Hotel Asrilia. 8. Menindaklanjuti progres rekrutment petani milenial untuk fasilitasi pembiayaan dan offtaker/avalis serta memulai proses pemagangan petani milenial komoditas burung puyuh. 9. untuk kelancaran distribusi pangan sebagai dampak pembatasan aktivitas sosial, pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kerjasama dengan platform telkom agree. 10. dalam upaya penyerapan hasil produksi telur dan ayam, meluncurkan program edukasi protein ayam dan telur 11. menjalin kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan BUMD PT. AgroJabar dalam penyelenggaraan program petani milenial melalui kegiatan budidaya burung puyuh

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa kegiatan pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh TPID Jawa Barat secara umum berdampak dalam mengendalikan laju inflasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi kedepannya seperti: 1. untuk mengantisipasi kenaikan kasus positif, pemerintah mempercepat distribusi vaksin dan vaksinasi di masyarakat untuk umur 18 tahun ke atas dan orang tua. 2. Perlu adanya antisipasi kelangkaan tahu tempe dikarenakan adanya kenaikan harga kedelai impor, 3. Melanjutkan proses peningkatan dan Oksigen 4. Melanjutkan proses pemulihan ekonomi sektor pertanian melalui program petani milenial

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Langkah kebijakan yang diambil oleh TPID Provinsi Jawa Barat dalam pengendalian inflasi selama periode triwulan-II 2021 diantaranya: 1. Dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat dan umkm naik kelas maka perlu adanya edukasi kepada umkm untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hingga bisa menembus pasar ekspor 2. Perlu diambil langkah untuk menyelamatkan bisnis kuliner terutama pada restoran dan kafe 3. Perlu adanya transformasi pasar tradisional menjadi pasar digital sebagai langkah antisipasi adanya kebijakan pembatasan sosial dan resiko penularan covid-19 4. Perlu adanya kolaborasi dengan daerah provinsi lain guna untuk saling mendukung dalam pemulihan ekonomi nasional